ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan terjadinya perubahan tujuan dari pajak yang mana awalnya diberikan secara Cuma-Cuma tanpa ada imbalan yang kemudian menjadi pemungutan yang bersifat memaksa untuk kepentingan bersama secara timbal balik meskipun tidak secara langsung, sehingga perlu ada aturan-aturan yang lebih baik agar sifat yang memaksa tersebut tetap ada namun unsur keadilan terhadap masyarakat lebih diperhatikan. Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan besar dalam penerimaan pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak pertambahan nilai ditinjau dari sudut ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab pemabayaran pajak ke kas Negara pada pihak-pihak yang berbeda.Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli atau penerima jasa dari tindakan sewenang-wenang Negara (pemerintah). PPN sebagai pajak yang Objektif karena timbulnya kewajiban pajak di bidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. PPN diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai. Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa Notaris/PPAT adalah salah satu Pengusaha Kena Pajak atas setiap jasa yang diberikannya kepada masyarakat dengan dan diatur dalam peraturan lain tentang Notaris/PPAT yang bisa dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu Notaris/PPAT yang Peredaran Bruto dalam setahun Rp.4.800.000.000,- (Empat Milyar Delapan ratus Juta Rupiah). Dengan adanya pembebanan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa notaris/PPAT, maka perlu diketahui bagaimanakah pelaksanaan pembebanan pajak pertambahan nilai terhadap Notaris/PPAT berdasarkan undang-undang Pajak pertambahan nilai dan kendala dan solusi apa saja yang dihadapi dalam pembebanan PPN atas jasa notaris/PPAT tersebut. Untuk mengkaji dan menjawab permasalahan tersebut di atas maka penulisan tesis ini mempergunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan obyek penelitian dalam hal ini ketentuan terkait pembebanan PPN bagi Notaris dan PPAT sedangkan empiris yaitu mengkaji implementasi pembebanan PPN bagi Notaris dan PPAT khususnya di Kota Kendari. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Kendari dan Populasi dalam penelitian ini adalah Notaris / PPAT yang yang terdapat di kota Kendari konsultan Pajak dan kantor Pajak Pratama Kendari. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Notaris/PPAT di Kota Kendari belum ada yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kota Kendari Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pihak pajak susah untuk menghitung nilai dari akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT dikota Kendari . Dan adanya kehendak dari para Notaris/PPAT agar mereka di berikan upah pungut sebagaimana yang pemerintah beri insentif kepada instansi yang memungut pajak sehingga mereka suka rela atau mau mengkukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak dan Disarankan kepada Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak hendaknya jasa hukum

yang diberikan oleh seorang Notaris/PPAT tidak dimasukkan sebagai jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang juga diberikan terhadap beberapa jenis jasa lainnya yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. dan Perlu mengatur terkait upah pungut bagi jasa Notaris agar Notaris dalam memberikan pelayanan jasa memiliki tanggung jawab hukum karena mendapatkan upah dari negara.

Kata Kunci : *Pajak Pertambahan Nilai, Jasa Notaris/PPAT*

ABSTRACT

Tax is one of the sources of state revenue which is very important for the implementation and improvement of national development which aims to increase the prosperity and welfare of the people. together reciprocally although not directly, so that better regulations need to be in place so that the coercive nature remains, but the elements of justice towards society are given more attention. One type of tax that has a big role in government revenue is Value Added Tax (VAT). Value added tax in terms of legal science is a type of tax that places the position of the bearer of the tax burden with the position of the person in charge of paying taxes to the State treasury on different parties. This is intended to protect buyers or service recipients from arbitrary actions by the State (government). VAT as an objective tax due to the incidence of tax liability in the field of VAT is very much determined by the existence of the tax object. VAT is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 42 of 2009 concerning the third amendment to Law Number 8 of 1983 concerning Value Added Tax. In this Law it is stipulated that a Notary Public / PPAT is one of the Taxable Entrepreneurs for every service he provides to the public with and is regulated in another regulation concerning Notary / PPAT which can be confirmed as a Taxable Entrepreneur, namely Notary / PPAT whose gross turnover in a year is Rp. .4,800,000,000, - (Four Billion Eight hundred Million Rupiah). With the imposition of Value Added Tax on notary / PPAT services, it is necessary to know how the implementation of the imposition of value added tax on Notaries / PPAT based on the value added tax law and what problems and solutions are faced in charging VAT for such notary / PPAT services. To study and answer the above problems, the writing of this thesis uses descriptive analytical research with an empirical juridical approach, namely examining the laws and regulations relevant to the object of research, in this case the provisions related to the imposition of PPN for Notaries and PPAT while empirical. namely examining the implementation of VAT imposition for Notaries and PPAT especially in Kendari City. The location of the research was carried out in the Kendari City area and the population in this study was a Notary / PPAT located in the city of Kendari, a tax consultant and the Kendari Pratama Tax office. Based on the results of the study, it was found that the Notary / PPAT in Kendari City has not been registered as a Taxable Entrepreneur in Kendari City. This is due to several things, namely the tax authorities find it difficult to calculate the value of the deed made by the Notary Public / PPAT in Kendari City. And there is a will from the Notary Public / PPAT so that they are given withholding wages as the government gives incentives to agencies that collect taxes so that they voluntarily or want to establish themselves as taxable entrepreneurs and it is recommended that the Government, especially the Directorate General of Taxes, provide legal services provided by a Notary Public / PPAT is not included as a service subject to Value Added Tax as is also provided for several other types of services that are not subject to Value Added Tax. and It is necessary to regulate the related levies for notary services so that notaries in providing services have a legal responsibility because they receive wages from the state.

Keywords: *Value Added Tax, Notary Services / PPAT*